



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGITO**
2. Jabatan : **STAF AHLI HUBUNGAN ANTAR -LEMBAGA**
3. NHK : **644047**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.475.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 1.200 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000
7. Tanah Seluas 1.486 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
8. Tanah Seluas 3 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **484.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 445.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.



7.000.000

4. MOTOR, KAWASAKI KLX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 33.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 557.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.550.000.000

III. HUTANG

Rp. 419.572.207

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.130.427.793

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.